



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
NOMOR 900/62 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG NOMOR 900/18  
TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 900/18 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/702/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 900/18 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 89);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 900/18 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak September 2023.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **13 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN /  
PENGGUNA BARANG,

**ttd**

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
NOMOR 900/62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG NOMOR 900/18 TAHUN 2023 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
ANGGARAN 2023

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

| BIRO                                    | Nama                          | Kode |      |            | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | NIP                           | Prog | Keg  | Sub<br>keg |                                                                               |
|                                         | Jabatan                       |      |      |            |                                                                               |
| 1                                       | 2                             | 3    | 4    | 5          | 6                                                                             |
|                                         |                               |      |      |            |                                                                               |
| BIRO UMUM SETDA<br>PROVINSI JAWA TENGAH | KASUBBAG KEUANGAN             | 01   | 1.02 | 01         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             |
|                                         |                               | 01   | 1.02 | 02         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 |
|                                         |                               | 01   | 1.02 | 03         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              |
|                                         |                               | 01   | 1.02 | 07         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
|                                         |                               | 01   | 1.06 | 09         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          |
|                                         |                               | 01   | 1.11 | 01         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah           |
|                                         |                               | 01   | 1.04 | 07         | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                        |
|                                         | KASUBBAG SARANA DAN PRASARANA | 01   | 1.03 | 02         | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           |
|                                         |                               | 01   | 1.03 | 06         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   |
|                                         |                               | 01   | 1.07 | 05         | Pengadaan Mebel                                                               |
|                                         |                               | 01   | 1.07 | 06         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         |
|                                         |                               | 01   | 1.07 | 07         | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                  |

|  |                                        |    |      |    |                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | KASUBBAG PELAYANAN RUMAH TANGGA        | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   |
|  |                                        | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |
|  |                                        | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |
|  |                                        | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |
|  |                                        | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |
|  |                                        | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |
|  |                                        | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |
|  |                                        | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |
|  |                                        | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |
|  |                                        | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
|  |                                        | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |
|  |                                        | 01 | 1.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 |
|  |                                        | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |
|  |                                        | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |
|  |                                        | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |
|  | KABAG TU DAN RUMAH TANGGA PIMPINAN     | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              |
|  |                                        | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |
|  |                                        | 01 | 1.11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                             |
|  |                                        | 01 | 1.11 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 |
|  |                                        | 01 | 1.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        |
|  |                                        | 01 | 1.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                    |
|  |                                        | 01 | 1.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                              |
|  |                                        | 01 | 1.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                               |
|  |                                        | 01 | 1.13 | 01 | Penyiapan Materi Pimpinan                                                                                          |
|  | KABAG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan                                                          |
|  |                                        | 01 | 1.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |
|  |                                        | 01 | 1.13 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                     |
|  |                                        | 01 | 1.13 | 03 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                   |

|                                                                           |                                                                                          |    |      |    |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                          | 01 | 1.14 | 01 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                                   |
|                                                                           |                                                                                          | 01 | 1.14 | 02 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                               |
|                                                                           |                                                                                          | 01 | 1.14 | 03 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                             |
| <b>BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH</b> | Ir. ACHMAD GUNAWAN, MT<br>19640327 199203 1 009<br>Analisis Kebijakan Ahli madya         | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          |
|                                                                           |                                                                                          | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                         |
|                                                                           |                                                                                          | 01 | 1.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      |
|                                                                           |                                                                                          | 06 | 1.02 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                |
|                                                                           | SARWORINI, SP, MSi<br>19660718 199401 2 002<br>Analisis Kebijakan Ahli madya             | 06 | 1.02 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             |
|                                                                           | BAGUS RACHMOYOJATI, S.Pt<br>19750523 200312 1 003<br>Analisis Kebijakan Ahli madya       | 06 | 1.02 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
| <b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH SETDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>    | ENDI FAIZ EFFENDI, SPi, MA<br>19710909 199603 1 006<br>Analisis Kebijakan Ahli madya     | 08 | 1.01 | 01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                        |
|                                                                           |                                                                                          | 08 | 1.01 | 02 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                        |
|                                                                           | Dra. ENY ROKHISAH, M.Kes<br>19660928 199303 2 005<br>Analisis Kebijakan Ahli madya       | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               |
|                                                                           |                                                                                          | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             |
|                                                                           |                                                                                          | 08 | 1.02 | 01 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                                                   |
|                                                                           |                                                                                          | 08 | 1.02 | 02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                      |
|                                                                           |                                                                                          | 08 | 1.02 | 03 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                      |
|                                                                           | TEMMY PURBOYONO, ST,SH,MM<br>19730106 199903 1 010<br>Analisis Kebijakan Ahli madya      | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          |
|                                                                           |                                                                                          | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                         |
|                                                                           |                                                                                          | 08 | 1.01 | 03 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                     |
| <b>BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>                              | ZRP.TJ. MULYONO, SH, MH<br>19670922 198903 1 004<br>Analisis Hukum Ahli Madya            | 05 | 1.02 | 01 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                         |
|                                                                           |                                                                                          | 05 | 1.02 | 02 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                          |
|                                                                           | SRI WAHYUNINGSIH, SH<br>19691007 199401 2 001<br>Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          |
|                                                                           |                                                                                          | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                         |

|                                                                     |                                                                                                   |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | HARYONO WIDYASTOMO, SH, MH<br>19671022 199303 1 006<br>Perancang Perundang-Undangan<br>Ahli Madya | 05 | 1.01 | 04 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                     |                                                                                                   | 05 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |                                                                                                   | 05 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     |                                                                                                   | 05 | 1.01 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     |                                                                                                   | 01 | 1.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>BIRO KESEJAHTERAAN<br/>RAKYAT SETDA PROVINSI<br/>JAWA TENGAH</b> | MUKHAMAD YUSUF, S.Ag MM<br>19660505 199203 1 014<br>Analisis Kebijakan Ahli madya                 | 04 | 1.01 | 01 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                     |                                                                                                   | 04 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                                                                   | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                                                                                   | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | GUNAWAN SUDHARSONO, SE,<br>SH, M.Si<br>19690214 199703 1 004<br>Analisis Kebijakan Ahli madya     | 04 | 1.02 | 01 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                                                                                   | 04 | 1.02 | 02 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                           |
|                                                                     |                                                                                                   | 04 | 1.02 | 03 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                              |
|                                                                     | WORO BOEDISAYEKTI, S.Sos,M.Si<br>19671024 198803 2 007<br>Analisis Kebijakan Ahli madya           | 04 | 1.03 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            |
|                                                                     |                                                                                                   | 04 | 1.03 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| <b>BIRO ORGANISASI SETDA<br/>PROVINSI JAWA TENGAH</b>               | Drs. AHMAD ABADI, Msi<br>19641006 199503 1 002<br>Analisis Kebijakan Ahli madya                   | 02 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                     |                                                                                                   | 02 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     |                                                                                                   | 02 | 1.01 | 03 | Penataan Analisis Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | Drs. JUWANDI, M.Si<br>19690419 199001 1 001<br>Analisis Kebijakan Ahli madya                      | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                                                                                   | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                                                                   | 02 | 1.02 | 04 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                  |    |      |    |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | AGUSTINUS AGUS<br>SUDARMANTO,S.STP, MM<br>19760812 199703 1 003<br>Analisis Kebijakan Ahli madya | 02 | 1.02 | 05 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                  | 02 | 1.02 | 01 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                  | 02 | 1.02 | 02 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                                  | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                           |
|                                                                                   |                                                                                                  | 01 | 1.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                |
|                                                                                   |                                                                                                  | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                    |
| <b>BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH</b> | Drs. HARIYONO<br>BAMBANGSATRIYA, M.Si<br>19641124 198903 1 010<br>Analisis Kebijakan Ahli madya  | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                             |
|                                                                                   |                                                                                                  | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                  | 03 | 1.01 | 01 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                  | 03 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                  | 03 | 1.01 | 03 | Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                                      |
|                                                                                   | Ir. BETTY WULANDARI, M.P<br>19680925 199403 2 004<br>Analisis Kebijakan Ahli madya               | 03 | 1.02 | 01 | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah                                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                  | 03 | 1.02 | 02 | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                  | 03 | 1.02 | 03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                  |
|                                                                                   | Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM<br>19700416 199009 1 001<br>Analisis Kebijakan Ahli madya          | 03 | 1.02 | 01 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                  | 03 | 1.02 | 02 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                  | 03 | 1.02 | 03 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                                        |
| <b>BIRO PEREKONOMIAN DAERAH SETDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>                        | JULY EMMYLIA, SE, MM<br>19720713 199703 2 005                                                    | 06 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                  | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                             |
|                                                                                   |                                                                                                  | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                            |
|                                                                                   | AGUS PRASUTIO, SH,M.Si<br>19690726 199003 1 002<br>Analisis Kebijakan Ahli madya                 | 06 | 1.03 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  |
|                                                                                   |                                                                                                  | 06 | 1.03 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |
|                                                                                   |                                                                                                  | 06 | 1.03 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                  | 06 | 1.03 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               |

|                                                                                       |                                                                                                                            |    |      |    |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                            | 06 | 1.03 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan                |
|                                                                                       | ENY HARYANTI, S.PD, M.Pd<br>19640909 198812 2 001<br>Analisis Kebijakan Ahli madya                                         | 06 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                |
| <b>BIRO ADMINISTRASI<br/>PENGADAAN BARANG/JASA<br/>SETDA PROVINSI JAWA<br/>TENGAH</b> | RUSLI SOFIAN MURWANTO,<br>S.Kom, M. Kom<br>19680328 199703 1 002<br>Kabag Pengelolaan Pengadaan<br>Barang/Jasa             | 07 | 1.01 | 01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                |
|                                                                                       |                                                                                                                            | 07 | 1.01 | 02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                         |
|                                                                                       |                                                                                                                            | 07 | 1.01 | 03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                             |
|                                                                                       | MUFTI AGUNG WIBOWO, S. Kom,<br>MIT<br>19731117 199803 1 007<br>Kabag Pengelolaan Sistem<br>Informasi Pengadaan Barang/Jasa | 07 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik                                |
|                                                                                       |                                                                                                                            | 07 | 1.02 | 02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                       |
|                                                                                       |                                                                                                                            | 07 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                               |
|                                                                                       | SUDIRMAN, SH, MM<br>19680110 199403 1 005<br>Analisis Kebijakan Ahli madya                                                 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          |
|                                                                                       |                                                                                                                            | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                         |
|                                                                                       |                                                                                                                            | 07 | 1.03 | 01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                       |
|                                                                                       |                                                                                                                            | 07 | 1.03 | 02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                               |
|                                                                                       |                                                                                                                            | 07 | 1.03 | 03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa |

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

**ttd**

SUMARNO